



2023 PERUBAHAN RENJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan harapan agar rencana kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya serta berkesesuaian dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur, dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Balangan. Renja tersebut juga merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dalam proses perumusan/penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebaik mungkin. Namun karena keterbatasan dalam banyak hal, maka kami menyadari bahwa renja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga perubahan renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi BKPSDM Kabupaten Balangan.

Balangan, Juli 2023

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

Pempina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penyusunan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	4
BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	11
A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD	11
B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	13
C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	14
D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD.....	15
D. Analisis Sosial Ekonomi.....	25
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No.	Judul Tabel dan Gambar	Halaman
2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan BKPSDM s.d. Triwulan II Tahun 2022	5
3.1.	Hubungan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-202	12
3.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	13
3.2.	Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2022	13
3.3.	Perubahan/Penyesuaian Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023	14
3.4.	Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2022	18

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi riil dan empiris BKPSDM Kabupaten Balangan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan.

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran operasional untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah,

orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Adapun proses penyusunan Perubahan Renja hanya mencakup taha Rancangan dan Rancangan Akhir.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah:

1. Menyesuaikan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Menjadi dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah; dan
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD
- B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
- D. Analisis Sosial Ekonomi

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 menunjukkan hasil relatif sesuai rencana yang ditetapkan (*on the track*). Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada periode dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata kinerja program tercapai 75,3%;
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan tercapai 52,53%; dan
3. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan tercapai 57,17%.

Sedangkan anggaran yang diserap atau direalisasikan sampai triwulan II sebesar Rp 7.129.975.713,00 (*tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) atau terealisasi sebesar 40,25% dari pagu murni 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 17.713.675.840,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

Catatan yang harus ditekankan adalah salah satu indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu “Persentase Aset dalam Kondisi Baik”, yang masih menggunakan capaian tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan belum adanya hasil sensus aset terbaru yang teknis penilaiannya dikoordinir oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan. Sambil menunggu instruksi dari bidang tersebut, maka hasil penilaian aset tahun 2021 masih relevan digunakan sampai terbit hasil penilaian/penaksiran terbaru.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
				8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%								
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	72	35.279.466.250	75,79	8.199.930.997	67	6.432.832.040	75,79	1.608.139.985	71,55	3.654.033.362					71,55	3.654.033.362	106,79	56,8	71,55	3.654.033.362,00	99,38	10,36	
			Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%		95,33 %		100%		95,33%		95,33%					95,33%		95,33		95,33%		95,33			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	430.195.000	100%	127.028.888	100%	83.459.000	46,67%	7.572.492	60%	24.426.292				60%	24.426.292	60	29,27	60%	24.426.292,00	60	5,68		
1.	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 dokumen	183.912.000	16 dokumen	83.912.680	8 dokumen	27.827.000	3 dokumen	4.481.135	4 dokumen	12.989.335				4 dokumen	12.989.335	50	46,68	20 dokumen	96.902.015,00	41,67	52,69	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 dokumen	94.134.000	8 dokumen	24.506.750	4 dokumen	27.190.000	1 dokumen	3.091.357	2 dokumen	7.983.357				2 dokumen	7.983.357	50	29,36	10 dokumen	32.490.107,00	50	34,51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
3.	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dokumen	152.149.000	6 dokumen	18.609.458	3 dokumen	28.442.000	3 dokumen	0	3 dokumen	3.453.600				3 dokumen	3.453.600	100	12,14	9 dokumen	22.063.058,00	50	14,5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												66,67	29,39			47,22	33,9					
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	28.806.728.150	97,22 %	5.726.965.318	100%	5.018.465.862	29,29%	1.398.063.576	52,15%	3.253.780.507				52,15%	3.253.780.507	52,15	64,84	52,15 %	3.253.780.507,00	52,15	11,3		
4.	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang	28.296.350.350	36 orang	5.600.369.844	37 orang	4.927.306.862	37 orang	1.387.263.576	37 orang	3.236.830.507				37 orang	3.236.830.507	100	65,69	37 orang	3.236.830.507,00	100	11,44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4371 dokumen	417.747.000	1371 dokumen	102.689.648	750 dokumen	64.709.000	190 dokumen	10.800.000	386 dokumen	16.470.000				386 dokumen	16.470.000	51,47	25,45	1757 dokumen	119.159.648,00	40,2	28,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
6.	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	25 laporan	92.630.800	5 laporan	23.905.826	5 laporan	26.450.000	5 laporan	0	5 laporan	480.000				5 laporan	480.000	100	1,81	10 laporan	24.385.826,00	40	26,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	

				Keuangan Akhir Tahun SKPD																			SUMBER DAYA MANUSIA																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																					83,82	30,99			60,07	22,1																			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																					Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah																			
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.303.705.300	100%	729.744.762	100%	386.020.528	25,07%	62.483.310	50,08%	154.317.910					50,08%	154.317.910	50,08	39,98	50,08 %	154.317.910,00	50,08																						
7.	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	967.708.300	5 paket	220.750.500	4 paket	86.162.900	0 paket	480.000	3 paket	17.491.000				3 paket	17.491.000	75	20,3	8 paket	238.241.500,00	38,1	24,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
8.	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	28080 dokumen	106.553.000	9360 dokumen	23.980.000	4680 dokumen	31.547.628	1170 dokumen	3.410.000	2340 dokumen	7.320.000				2340 dokumen	7.320.000	50	23,2	11700 dokumen	31.300.000,00	41,67	29,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
9.	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478 laporan	1.229.444.000	118 laporan	485.014.262	90 laporan	268.310.000	27 laporan	58.593.310	48 laporan	129.506.910				48 laporan	129.506.910	53,33	48,27	166 laporan	614.521.172,00	34,73	49,98	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																					59,44	30,59			38,16	34,66																			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																					Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100%	623.216.500	50%	196.515.000	100%	322.053.800	25%	0	25%	0					25%	0	25	0	75%	196.515.000,00	75	31,53																					
10.	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	623.216.500	2 unit	196.515.000	7 unit	322.053.800	0 unit	0	0 unit	0				0 unit	0	0	0	2 unit	196.515.000,00	7,69	31,53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																					0	0			7,69	31,53																			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	1.518.003.300	24 Bulan	603.830.015	12 Bulan	409.278.400	3 Bulan	113.776.789	6 Bulan	173.154.135					6 Bulan	173.154.135	50	42,31	30 Bulan	776.984.150,00	41,67	51,18																					
11.	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	706.648.900	24 laporan	156.752.515	12 laporan	114.000.000	3 laporan	47.013.289	6 laporan	69.911.635				6 laporan	69.911.635	50	61,33	30 laporan	226.664.150,00	41,67	32,08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
12.	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	811.354.400	24 laporan	447.077.500	12 laporan	295.278.400	3 laporan	66.763.500	6 laporan	103.242.500				6 laporan	103.242.500	50	34,96	30 laporan	550.320.000,00	41,67	67,83	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																					50	48,15			41,67	49,95																			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	1.597.618.000	24 bulan	815.847.014	12 bulan	213.554.450	3 bulan	26.243.818	6 bulan	48.354.518					6 bulan	48.354.518	50	22,64	30 bulan	864.201.532,00	41,67	54,09																					
13.	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	705.408.000	18 unit	127.190.014	20 unit	119.674.450	6 unit	17.003.818	9 unit	27.732.818				9 unit	27.732.818	45	23,17	27 unit	154.922.832,00	135	21,96	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
14.	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	892.210.000	1 unit	688.657.000	1 unit	93.880.000	1 unit	9.240.000	1 unit	20.621.700				1 unit	20.621.700	100	21,97	1 unit	20.621.700,00	100	2,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																					72,5	22,57			117,5	12,14																			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																					47,87	33,17			53,43	26,75																			
Predikat Kinerja (Kegiatan)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah																			

2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku	100%	20.840.451.700	100%	10.980.807.184	100%	8.179.168.800	25%	723.691.981	50%	1.129.708.106					50%	1.129.708.106	50	13,81	50%	1.129.708.106,00	50	5,42	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK	70%	8.413.575.800	38,33 %	3.401.640.298	60%	740.509.700	47,60%	67.325.450	50,88%	125.296.442					50,88%	125.296.442	84,8	16,92	50,88 %	125.296.442,00	72,69	1,49	
			Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini	100%		100%		100%		25%		50%						75%		75		75%		75		
15.	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 dokumen	7.253.599.000	2 dokumen	3.120.083.999	1 dokumen	133.942.000	1 dokumen	9.240.000	1 dokumen	23.086.117					1 dokumen	23.086.117	100	17,24	3 dokumen	3.143.170.116,00	50	43,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16.	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 dokumen	274.386.800	2 dokumen	40.493.000	1 dokumen	67.933.000	1 dokumen	3.960.000	1 dokumen	26.364.000					1 dokumen	26.364.000	100	38,81	3 dokumen	66.857.000,00	50	24,37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
17.	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	206.200.000	1 lembaga	108.575.777	1 lembaga	55.100.800	1 lembaga	5.332.000	1 lembaga	7.972.000					1 lembaga	7.972.000	100	14,47	1 lembaga	7.972.000,00	100	3,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18.	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 laporan	679.390.000	1 laporan	132.487.522	1 laporan	483.533.900	0 laporan	48.793.450	0 laporan	67.874.325					0 laporan	67.874.325	0	14,04	1 laporan	200.361.847,00	20	29,49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			75	21,14			55	25,26		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi	100%	1.166.878.400	38,33 %	224.994.829	100%	173.533.000	47,60%	54.626.230	50,88%	97.266.263						50,88%	97.266.263	50,88	56,05	50,88 %	97.266.263,00	50,88	8,34	
		Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tiap periode	100%		98,18 %		100%		50%		50%							50%		50		50%		50		
19.	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6 dokumen	613.812.400	2 dokumen	140.299.300	1 dokumen	82.310.600	1 dokumen	16.736.000	1 dokumen	45.234.297					1 dokumen	45.234.297	100	54,96	3 dokumen	185.533.597,00	50	30,23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 dokumen	553.066.000	4 dokumen	84.695.529	2 dokumen	91.222.400	1 dokumen	37.890.230	1 dokumen	52.031.966					1 dokumen	52.031.966	50	57,04	5 dokumen	136.727.495,00	41,67	24,72	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			75	56			45,83	27,47		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45%	9.938.148.000	17,57 %	7.084.673.300	37%	6.888.021.100	17,57%	581.088.051	17,57%	823.177.251						17,57%	823.177.251	47,49	11,95	17,57 %	823.177.251,00	39,04	8,28	
21.	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 dokumen	1.693.677.250	2 dokumen	745.323.855	1 dokumen	305.638.900	1 dokumen	87.894.000	1 dokumen	122.909.000					1 dokumen	122.909.000	100	40,21	3 dokumen	868.232.855,00	50	51,26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
22.	5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	6 Dokumen	2.708.921.850	2 Dokumen	2.009.925.607	1 Dokumen	4.246.056.000	1 Dokumen	466.566.303	1 Dokumen	489.479.303					1 Dokumen	489.479.303	100	11,53	3 Dokumen	2.499.404.910,00	50	92,27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

23.	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	32 orang	2.290.338.000	10 orang	2.841.733.848	5 orang	454.163.000	0 orang	7.408.800	2 orang	167.300.800				2 orang	167.300.800	40	36,84	12 orang	3.009.034.648,00	37,5	131,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	1438 orang	1.609.526.300	46 orang	212.479.700	54 orang	370.760.800	27 orang	13.480.000	55 orang	23.749.200				55 orang	23.749.200	101,85	6,41	101 orang	236.228.900,00	7,02	14,68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25.	5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	980 orang	1.635.684.600	12 orang	1.275.210.290	217 orang	1.511.402.400	5 orang	5.738.948	12 orang	19.738.948				12 orang	19.738.948	5,53	1,31	24 orang	1.294.949.238,00	2,45	79,17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			69,48	19,26		29,39	73,75		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	100%	1.321.849.500	99,97 %	269.498.757	100%	377.105.000	99,97%	20.652.250	99,97%	83.968.150				99,97%	83.968.150	99,97	22,27	99,97 %	83.968.150,00	99,97	6,35		
		Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat	100%		74,05 %		100%		74,05%		74,05%					91,59%		91,59		92%		91,59			
26.	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 laporan	591.150.000	2 laporan	158.954.039	1 laporan	124.168.000	0 laporan	3.060.000	0 laporan	37.022.600				0 laporan	37.022.600	0	29,82	2 laporan	195.976.639,00	33,33	33,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
27.	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30 orang	134.700.000	0 orang	0	6 orang	103.675.000	0 orang	0	0 orang	0				0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28.	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1309 orang	142.080.000	309 orang	25.924.700	200 orang	55.380.000	0 orang	5.776.000	0 orang	11.215.200				0 orang	11.215.200	0	20,25	309 orang	37.139.900,00	23,61	26,14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29.	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 laporan	318.672.000	2 laporan	62.850.018	1 laporan	66.862.000	0 laporan	11.816.250	0 laporan	27.804.350				0 laporan	27.804.350	0	41,58	2 laporan	90.654.368,00	33,33	28,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30.	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 dokumen	135.247.500	1 dokumen	21.770.000	1 dokumen	27.020.000	1 dokumen	0	1 dokumen	7.926.000				1 dokumen	7.926.000	100	29,33	2 dokumen	29.696.000,00	40	21,96	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			20	24,2		26,05	21,94		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			71,39	15,31		37,51	3,49		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur	100%	13.690.034.300	35,08 %	2.137.894.544	69%	3.101.675.000	35,08%	71.157.000	33,87%	902.347.000				33,87%	902.347.000	49,09	29,09	33,87 %	902.347.000,00	33,87	6,59	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial	100%	13.690.034.300	100%	2.137.894.544	100%	3.101.675.000	0%	71.157.000	0%	902.347.000				0%	902.347.000	0	29,09	0%	902.347.000,00	0	6,59	
			Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar	100%		99,21 %		100%	0%	1,02%		1,02%				1,02%		1,02		1%		1,02			
31.	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	12 laporan	13.690.034.300	4 laporan	2.137.894.544	2 laporan	3.101.675.000	0 laporan	71.157.000	0 laporan	902.347.000				0 laporan	902.347.000	0	29,09	4 laporan	3.040.241.544,00	33,33	22,21	BADAN KEPEGAWAIAN

Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)										0	29,09								33,33	22,21		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)										Sangat Rendah	Sangat Rendah								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)										0,51	14,55								0	3,3		
Predikat Kinerja (Kegiatan)										Sangat Rendah	Sangat Rendah								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)										75,3	44,74								45,81	5,59		
Predikat Kinerja (Program)										Sangat Rendah	Sangat Rendah								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)										57,17	40,25								44,67	34,98		
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)										Rendah	Sangat Rendah								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Jumlah Anggaran dari seluruh Program										17.713.675.840	2.402.988.966										5.686.088.468	7.129.975.713
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1) manajemen/tata kelola internal organisasi yang terbangun cukup baik dan lingkungan kerja yang relatif kondusif; 2) sumber daya yang tersedia (khususnya SDM dan anggaran); serta 3) komunikasi dan koordinasi yang terjalin/terbangun cukup baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1) belum optimalnya implementasi tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM Aparatur; serta 2) masalah klasik terkait keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	1) melakukan konsolidasi internal dan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur secara berkesinambungan; 2) mengoptimalkan sumber daya yang tersedia disertai peningkatan kapasitas dan kompetensi secara berkelanjutan; serta 3) meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi serta kerja sama dengan pihak-pihak eksternal terkait																					

Faktor pendorong capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. manajemen/tata kelola internal organisasi yang terbangun cukup baik dan lingkungan kerja yang relatif kondusif;
2. sumber daya yang tersedia (khususnya SDM dan anggaran); dan
3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin/terbangun cukup baik dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur.

Faktor penghambat kinerja yang harus mendapat perhatian untuk diantisipasi dan ditangani oleh pimpinan mencakup:

1. Belum optimalnya implementasi tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM Aparatur;
2. Kemampuan adaptasi SDM Aparatur tidak merata untuk menghadapi perubahan yang disruptif; dan
3. Masalah klasik terkait keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas.

Adapun tindak lanjut yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan kinerja organisasi antara lain:

1. Melakukan konsolidasi internal dan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur secara berkesinambungan;
2. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia; dan
3. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi serta kerja sama dengan pihak-pihak eksternal terkait.

BAB III

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

“Membangun Desa, Menata Kota

Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan manajemen ASN adalah Misi Keempat. Tujuan misi tersebut, yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sedangkan sasaran dari Misi Keempat adalah: “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi”, dengan salah satu indikator berupa “Nilai IKM”. Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran dimaksud, ditetapkan dua program yang menjadi tanggung jawab BKPSDM berupa Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Beranjak dari Misi Keempat Bupati Balangan tersebut, maka tujuan strategis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Balangan adalah “Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”. Adapun sasaran strategis dari tujuan dimaksud mencakup 3 (tiga) hal:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur.

Adapun keterkaitan hubungan antara Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada skema berikut:

RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026	PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BKPSDM TAHUN 2021-2026
VISI	TUJUAN
Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional
	Indikator Tujuan
	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang Profesional
MISI IV	SASARAN
Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur
TUJUAN 4	Indikator Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Sistem Merit 3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
SASARAN 4.4	
Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	
Indikator Sasaran 4.4	
Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	

Gambar 3.1. Hubungan Keterkaitan Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran BKPSDM Kabupaten Balangan beserta indikator kinerjanya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pegawai ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN/Persentase ASN yang Profesional	87	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
				2. Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	325
				3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90

B. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran strategis beserta IKU BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengelolaan aset	1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM	67
		1.2. Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik	100%
2.	Optimalisasi Tata Kelola dan Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.1. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	50
		2.2. Indeks Sistem Merit	265
		2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kepegawaian	90

Dalam rangka mencapai target tersebut, BKPSDM pada tahun 2023 telah merencanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Adapun pagu anggaran murni yang dialokasikan berjumlah Rp 17.713.675.840,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*). Rincian program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja dan rincian besaran anggaran masing-masing dapat dilihat pada tabel 3.3.

C. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sasaran strategis dan IKU beserta target masing-masing indikator sebagaimana Tabel 3.2 mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penyesuaian Renstra harus dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Latar belakang penyesuaian lainnya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan yang disebutkan terakhir mengharuskan tiap instansi pemerintah untuk memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu yang dibangun berdasarkan model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*). Adapun perubahan/penyesuaian sasaran strategis dan IKU dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perubahan/Penyesuaian Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67
2.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	325
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90

Kebutuhan anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Rp 19.076.062.212,00 (*sembilan belas miliar tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah*). Total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.362.386.372,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*) dibandingkan dengan anggaran Renja Perangkat Daerah sebelum perubahan. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat tidak mengalami perubahan, yaitu 8 (delapan) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Indikator program dan kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator masing-masing dan rincian anggaran perubahan beserta alasan atau hal-hal yang menjadi justifikasi kebutuhan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

D. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SKPD

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 masing-masing berjumlah 3 (tiga) program, 11 (sebelas) sub kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - 4) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
 - d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Matriks Perubahan Renja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan
Tahun 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN				17.713.675.840				19.076.062.212	1.362.386.372		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BKPSDM		67	6.432.832.040	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		67	7.705.706.612	1.272.874.572		
	Persentase Pencatatan Pengelolaan Aset dalam Kondisi Baik		100,00%								
Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100,00%	83.459.000	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	101.421.000	17.962.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	8 Dokumen	27.827.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	8 Dokumen	27.827.000	0	-	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Dokumen	27.190.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Dokumen	19.030.000	-8.160.000	Pergeseran sebagian anggaran yang kemudian dialokasikan untuk jasa pembuatan/pengembangan aplikasi Monev Internal SKPD	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	3 Dokumen	28.442.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	3 Dokumen	54.564.000	26.122.000	Penambahan anggaran untuk membuat/mengembangkan aplikasi Monev Internal SKPD	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100,00%	5.018.465.862	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		100,00%	5.929.160.874	910.695.012		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	37 Orang	4.927.306.862	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	37 Orang	5.848.871.974	921.565.112	Penambahan anggaran yang dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN/PNS	Subbag Perencanaan dan Keuangan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	750 Dokumen	64.709.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	750 Dokumen	68.948.900	4.239.900	Penambahan anggaran untuk penggandaan dokumen dan perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi serta mengikuti berbagai kegiatan di luar daerah	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	5 Laporan	26.450.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Balangan	5 Laporan	11.340.000	-15.110.000	Pengurangan anggaran untuk digeser ke sub kegiatan lain yang membutuhkan tambahan anggaran (salah satunya untuk jasa pembuatan aplikasi Monev Internal SKPD) serta dilakukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran	Subbag Perencanaan dan Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum		100,00%	386.020.528	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik		100,00%	433.108.088	47.087.560		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	4 Paket	86.162.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	4 Paket	75.527.800	-10.635.100	Pengurangan anggaran untuk digeser ke sub kegiatan lain yang membutuhkan tambahan anggaran (salah satunya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah) serta dilakukan dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi anggaran	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	4680 Dokumen	31.547.628	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	36 Dokumen	44.599.488	13.051.860	Penambahan anggaran untuk biaya publikasi dan langganan koran cetak harian	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	90 Laporan	268.310.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	90 Laporan	312.980.800	44.670.800	Penambahan anggaran untuk rapat konsultasi dan koordinasi urusan kepegawaian, diklat, serta urusan penunjang ke luar daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU		100,00%	322.053.800	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan		100,00%	321.053.800	-1.000.000		

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Balangan	7 Unit	322.053.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Balangan	15 Unit	321.053.800	-1.000.000	Pengurangan anggaran untuk digeser ke sub kegiatan lain yang membutuhkan tambahan anggaran serta dilakukan dalam rangka optimalisasi, efektivitas, dan efisiensi anggaran	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	409.278.400	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik		100,00%	506.838.400	97.560.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	114.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	183.300.000	69.300.000	Penambahan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik, air bersih, dan internet kantor	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	295.278.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 Laporan	323.538.400	28.260.000	Penambahan anggaran yang sebagian besar dialokasikan sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	213.554.450	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	414.124.450	200.570.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	20 Unit	119.674.450	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	20 Unit	128.424.450	8.750.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta menutupi kekurangan anggaran perpanjangan pajak dan servis kendaraan bermotor dinas/jabatan	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	1 Unit	93.880.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	1 Unit	285.700.000	191.820.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan menutupi kekurangan anggaran pemeliharaan peratan dan mesin serta gedung dan bangunan	Subbag Umum dan Kepegawaian

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase tata kelola dan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur berlaku		100,00%	8.179.168.800	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN		0,00%	8.268.680.600	89.511.800		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK		60,00%	740.509.700	Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja		54,00%	765.713.700	25.204.000		
	Persentase data kepegawaian yang mutakhir/terkini		100,00%								
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	1 Dokumen	133.942.000	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Balangan	1 Dokumen	139.382.000	5.440.000	Penambahan anggaran dalam rangka menghadiri berbagai pelaksanaan kegiatan serta rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	1 Dokumen	67.933.000	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Balangan	1 Dokumen	71.413.000	3.480.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Balangan	1 Lembaga	55.100.800	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Balangan	1 Lembaga	58.580.800	3.480.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	1 Laporan	483.533.900	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Balangan	1 Laporan	496.337.900	12.804.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan menutupi kekurangan anggaran hosting	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi, fungsional yang terisi		100,00%	173.533.000	Persentase Jabatan Pimpinan dan Administrasi yang Terisi (pembatasan pada jabatan Eselon II, III, dan IV)		100,00%	230.973.000	57.440.000		

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang terbit tepat waktu		100,00%		Persentase Jabatan Fungsional yang Terisi sesuai Prioritas Aktual Reformasi Birokrasi		32,00%				
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Balangan	1 Dokumen	82.310.600	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Balangan	1 dokumen	102.727.600	20.417.000	Penambahan anggaran dalam rangka penggandaan dokumen dan menghadiri berbagai pelaksanaan kegiatan serta rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	2 Dokumen	91.222.400	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Balangan	2 dokumen	128.245.400	37.023.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan menghadiri berbagai pelaksanaan kegiatan serta rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi teknis dan fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		37,00%	6.888.021.100	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional - di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan)		23,00%	6.891.460.900	3.439.800		
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Balangan	1 Dokumen	305.638.900	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Balangan	1 Dokumen	305.638.900	0	-	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	1 Dokumen	4.246.056.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Balangan	1 Dokumen	4.249.496.000	3.440.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Balangan	5 Orang	454.163.000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Balangan	3 Orang	454.162.800	-200	-	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kab. Balangan	54 Orang	370.760.800	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kab. Balangan	52 Orang	370.760.800	0	-	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Balangan	217 Orang	1.511.402.400	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Balangan	217 Orang	1.511.402.400	0	-	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai ASN yang disiplin		100,00%	377.105.000	Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik		100,00%	380.533.000	3.428.000		
	Persentase penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat		100,00%								
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	1 Laporan	124.168.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Balangan	1 Laporan	124.168.000	0	-	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Balangan	6 Orang	103.675.000	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Balangan	3 Orang	103.675.000	0	-	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Balangan	200 Orang	55.380.000	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Balangan	200 Orang	55.380.000	0	-	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	1 Laporan	66.862.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Balangan	1 Laporan	70.290.000	3.428.000	Penambahan anggaran sebagai konsekuensi kenaikan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Balangan	1 Dokumen	27.020.000	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Balangan	1 Dokumen	27.020.000	0	-	Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.101.675.000				3.101.675.000	0		

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN (ANGGARAN DAN PENYESUAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH)				Jumlah Perubahan (+/-)	Keterangan / Catatan Penting	Unit SKPD
	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur		69,00%	3.101.675.000	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN		0,00%	3.101.675.000	0		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang lulus sertifikasi kompetensi manajerial		100,00%	3.101.675.000	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK)			3.101.675.000	0		
	Persentase CPNS yang lulus Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar		100,00%								
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	2 Laporan	3.101.675.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Balangan	2 Laporan	3.101.675.000	0 -		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

D. Analisis Sosial Ekonomi

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tidak berdampak langsung terhadap peningkatan sosial ekonomi, karena tugas dan fungsi (*core business*) BKPSDM Kabupaten Balangan adalah unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur. Jadi, layanan BKPSDM Kabupaten Balangan bersifat *segmented* pada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau tidak terkait dengan pelayanan dasar kepada publik sebagai masyarakat dalam arti luas. Dengan kata lain, BKPSDM merupakan lembaga teknis penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keluaran, dampak, dan manfaat pada aspek sosial dan ekonomi memang tidak dapat diukur dan dianalisis secara langsung melalui dokumen renja, tetapi harus diakui bahwa BKPSDM berperan penting dalam pemberian layanan kepegawaian dan pengembangan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) sebagai ASN. Sehingga diharapkan aparatur tersebut dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan serta memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan 2021-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, renja, dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen renja yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di samping itu, perubahan renja dibutuhkan untuk mengantisipasi dinamika dan melakukan adaptasi terhadap perubahan kebijakan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 sudah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal. Sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan BKPSDM Kabupaten Balangan. Dengan demikian, Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan perubahan anggaran BKPSDM yang menjadi acuan pengelolaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-P SKPD Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran perubahan BKPSDM Tahun Anggaran 2023. RKA-P tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

- Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023.
2. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
 3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BKPSDM Kabupaten Balangan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini diharapkan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Balangan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Balangan, Juli 2023

Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan,



H. Sufriannor, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009